BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Audit

Menurut Mulyadi (2014:9), audit ialah suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan perihal kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan taraf kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut menggunakan kriteria yang sudah ditetapkan, serta penyampaian atas hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Agoes (2012:4), audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen secara kritis serta sistematis terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti sebagai pendukungnya, dengan maksud untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

Dapat disimpulkan, audit adalah suatu proses pengumpulan dan pemeriksaan bukti terhadap organisasi mengenai informasi untuk menentukan dan membuat laporan terkait sehingga sesuai standar, kriteria, dan praktek yang berlaku.

Dalam kegiatan audit, terdapat proses yang dilaksanakan. Proses audit adalah serangkaian prosedur untuk menguji dan memastikan bahwa proses dilakukan

secara efektif dan sesuai dengan mekanisme. Proses audit harus dilakukan oleh individu yang kompeten dan independen. Hal tersebut berguna untuk menghasilkan laporan yang memberikan perspektif yang tepat bagi pengguna/*client*.

2.2 Jenis Audit

Selain pengertian audit, terdapat 3 jenis audit utama yang dikemukakan oleh Arens dkk. (2016), yaitu:

- 1) Audit operasional, adalah pemeriksaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas tiap bagian dari prosedur dan metode kegiatan suatu organisasi. Pada akhir kegiatan, biasanya manajemen mengharapkan adanya rekomendasi untuk peningkatan operasional dari pemeriksaan tersebut.
- 2) Audit kepatuhan, ialah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah *auditee* (pihak yang diperiksa) mengikuti prosedur atau aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Hasil audit ini dilaporkan kepada pihak manajemen, bukan kepada pihak eksternal.
- 3) Audit laporan keuangan, merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan untuk memastikan apakah laporan keuangan (yang diverifikasi) sesuai dengan kriteria yang dimaksud. Dalam menentukan keuangan dilaporkan secara wajar sesuai standar akuntansi, maka auditor perlu mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah laporan tersebut mengandung kesalahan material atau salah saji lainnya.

2.3 Pengertian Auditor

Menurut Arens dkk. (2016), auditor ialah seseorang yang memberikan jaminan mengenai laporan keuangan dan jaminan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan, serta jenis informasi lainnya pada suatu perusahaan ataupun

instansi. Auditor juga secara rutin melaksanakan pemeriksaan atas informasi yang dapat diukur, misalnya laporan keberlanjutan suatu perusahaan.

Sedangkan, menurut Hakim (2008:15), auditor merupakan seseorang yang independen dan memiliki kompetensi untuk memberikan pendapat atau pertimbangan mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan atas asersi/entitas melalui kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa auditor ialah seseorang yang bertugas mengaudit dengan memberikan pendapat adanya kewajaran atau tidak terhadap laporan keuangan dan kegiatan, baik dari suatu perusahaan, instansi, maupun organisasi. Auditor berkewajiban untuk memiliki pemahaman secara menyeluruh terhadap entitas dan lingkungannya. Pemahaman tersebut mencakup hal-hal mengenai klien, peraturan, serta lingkungan operasi termasuk adanya hubungan eksternal. Auditor juga perlu mempertimbangkan strategi dan proses mengenai faktor penentu keberhasilan strategi tersebut.

2.4 Jenis Auditor

Auditor dibagi menjadi 4 jenis menurut Arens dkk. (2016), berupa:

- 1) Kantor Akuntan Publik, yaitu auditor yang memiliki tanggung jawab dan berhak atas kinerja audit laporan keuangan perusahaan publik, perusahaan nirlaba, dan perusahaan kecil. Kantor akuntan publik sering disebut auditor eksternal/independen yang membedakan dari auditor internal.
- 2) Auditor Pajak, yakni auditor yang bertanggung jawab untuk menerapkan peraturan pajak melalui pemeriksaan atas tercapainya penerimaan negara di bidang perpajakan, seperti mengaudit Surat Pemberitaan Tahunan (SPT).

Auditor yang melaksanakan pemeriksaan ini bisa disebut agen pendapatan internal.

- 3) Auditor Internal, ialah auditor yang bekerja dan berada di lingkungan perusahaan untuk melaksanakan audit demi tercapainya kepentingan manajemen perusahaan. Tanggung jawab auditor internal bervariasi, tergantung kepada pemberi kerja. Auditor internal tidak sepenuhnya independen dari entitas selama adanya hubungan atasan dengan karyawan. Contoh: Unit Satuan Pengawasan Intern.
- 4) Auditor Pemerintah, adalah auditor yang bekerja dengan mengevaluasi efisiensi, nilai ekonomis, dan efektivitas dari kebutuhan program pemerintah. Auditor pemerintah memiliki banyak kesamaan tanggung jawab dengan Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor ini banyak mengaudit informasi keuangan yang disiapkan oleh lembaga pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, sebelum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Contoh: BPK, Itjen, BPKP.

Sedangkan, menurut Mulyadi (2014:28) auditor dibagi menjadi 3 jenis, antara lain:

- 1) Auditor Internal, merupakan auditor yang bekerja pada perusahaan, baik swasta maupun negara, yang tugasnya memilih apakah kebijakan dan prosedur ditetapkan oleh manajemen sudah dipatuhi, misal menentukan efisiensi dan efektivitas mekanisme aktivitas perusahaan, memastikan keandalan informasi dihasilkan oleh beberapa bagian organisasi, menentukan bentuk penjagaan terhadap kekayaan suatu organisasi.

- 2) Auditor Independen, ialah auditor yang menyediakan jasa kepada masyarakat luas, melalui audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit ini ditujukan untuk para pengguna informasi keuangan, misal investor, dan instansi pemerintah.
- 3) Auditor Pemerintah, adalah auditor profesional yang bertugas di instansi pemerintah berupa mengaudit pusat pertanggungjawaban keuangan untuk disampaikan kepada pemerintah. Auditor pemerintah umumnya yaitu auditor yang bekerja di BPK, dan instansi pajak.

2.5 Laporan Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan tertulis yang berisi hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan. Format dan struktur LHP ditetapkan lebih lanjut dalam standar pelaporan. LHP digunakan oleh pihak yang berkewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. LHP diperlukan secara efisien dan efektif untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan. LHP juga tentunya berfungsi untuk mencegah gejala korupsi, meminimalisir adanya penyalahgunaan keuangan, serta sebagai alat yang kuat dalam penanganan tindak pidana korupsi.

LHP dibagi menjadi 3 jenis, adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan ini memuat opini, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk LHP pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan

DPD setelah menerima laporan keuangan pemerintah pusat. Sedangkan, untuk LHP pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. LHP pusat maupun daerah disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya.

2) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja

Laporan ini berisi mengenai temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. LHP kinerja nantinya disampaikan oleh BPK kepada DPD/DPRD/DPR, serta kewenangan pada Presiden/gubernur/bupati/walikota.

3) Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Laporan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan pemeriksaan yang telah dilakukan. LHP dengan tujuan tertentu memiliki persamaan dalam tujuan penyampaian dengan LHP kinerja, yaitu kepada DPD/DPRD/DPR, serta Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai kebijakannya.

2.6 Unsur Laporan Hasil Pemeriksaan

Di dalam suatu Laporan Hasil Pemeriksaan terdapat beberapa unsur penting. Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang SPKN, Unsur LHP terdiri dari:

1) Pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan selaras dengan standar pemeriksaan

Pemeriksa harus membuktikan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Pada hal terkait pemeriksa tidak melaksanakan standar pemeriksaan sebab restriksi lingkup yang material, maka hal tersebut wajib dinyatakan pada laporan.

2) Tujuan, lingkup, dan metodologi

Pemeriksa wajib menjelaskan tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan yang digunakan secara rinci dalam LHP. Informasi tersebut berguna bagi pengguna LHP agar dapat memahami maksud dan jenis pemeriksaan, serta adanya perspektif wajar dari hal yang telah dilaporkan.

Tujuan berisi hal yang ingin diraih dari pemeriksaan. Lingkup menjelaskan identifikasi sasaran pemeriksaan, aspek yang diperiksa, lokasi, lembaga, serta periode suatu pemeriksaan. Metodologi mendeskripsikan seluruh proses pemeriksaan untuk mencapai tujuan dari pemeriksaan.

3) Kesimpulan pemeriksaan

Kesimpulan pemeriksaan yaitu jawaban dari tujuan pemeriksaan yang sudah dicapai. Pemeriksa harus menyusun kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Suatu kesimpulan harus dinyatakan secara jelas dan meyakinkan, sehingga sesuai bukti dari metodologi yang dipakai.

Dalam hal pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyatakan kesimpulan dalam bentuk opini. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Opini merupakan pernyataan profesional sebagai suatu kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini diklasifikasikan menjadi 5 bentuk, yakni:

- a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), adalah opini yang menyebutkan tidak adanya kesalahan (wajar) pada laporan keuangan dalam segala hal material sesuai Standar Akuntansi yang berlaku. Jika membutuhkan tambahan

penting dalam laporan keuangan guna memberi pemahaman kepada pengguna, maka laporan disajikan opini WTP dengan Paragraf Penjelas.

- b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu opini yang menyatakan wajar pada laporan keuangan dalam segala hal yang material, kecuali dampak dari hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Hal-hal tersebut disajikan dalam LHP berisi opini tersebut.
- c. Tidak Wajar, yaitu opini yang menyebutkan bahwa laporan keuangan tidak dinyatakan wajar dengan posisi keuangan.
- d. Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), merupakan opini yang menjelaskan bahwa adanya ketidakwajaran atau tidak dalam semua hal yang material terhadap laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan atau adanya keraguan masa berlaku/hidup suatu entitas. Alasan penyebab TMP tersebut disajikan dalam LHP berisi opini tersebut.

4) Temuan dari pemeriksaan

Temuan adalah suatu hal yang terjadi diluar pemeriksaan seperti menemukan ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria yang dibutuhkan. Temuan yang mengandung adanya indikasi awal kecurangan disajikan pada LHP tanpa dijelaskan secara detail dugaan kecurangan tersebut. Pemeriksa lebih memfokuskan penjelasan dari dampak temuan pemeriksaan terhadap hal pokok sesuai tujuan pemeriksaan.

5) Rekomendasi pemeriksaan

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Rekomendasi pemeriksaan berguna untuk memperbaiki kelemahan dalam suatu pemeriksaan, serta bersifat konstruktif. Pemberitahuan rekomendasi harus sesuai dengan temuan, tujuan, serta kesimpulan hasil pemeriksaan. Khusus Pada PDTT bentuk pemeriksaan investigatif, pemeriksa tidak perlu memberikan rekomendasi.

6) Tanggapan pihak yang bertanggung jawab

Pemeriksa harus memperoleh tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dari pihak yang berkewajiban. Terkait kerahasiaan informasi, dalam PDTT bentuk pemeriksaan investigatif, pemeriksa tidak meminta tanggapan. Pemeriksa harus mengisi tanggapan dari pejabat pemerintah yang berkewajiban dalam temuan, rekomendasi, dan kesimpulan pemeriksa pada LHP.

7) Penandatanganan Laporan Hasil Pemeriksaan

LHP ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, atau berasal dari Anggota BPK. Wewenang penandatanganan dipercayakan kepada penanggung jawab pemeriksaan yang kompeten dan unggul.

2.7 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)

Berdasarkan Peraturan Bersama DPR dan BPK No. 1 Tahun 2018, IHPS adalah hasil pemeriksaan BPK selama periode satu semester. IHPS menjelaskan ringkasan terkait hasil pemeriksaan dalam satu semester, hasil pemantauan atas penyelesaian

ganti kerugian negara, serta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut mengenai rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK.

IHPS diinformasikan dan diserahkan kepada DPR yakni paling lambat 3 bulan sesudah semester yang berkaitan telah selesai dengan melampirkan Hasil Pemeriksaan dalam media data elektronik atau melalui internet. IHPS tersebut juga ditujukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan Badan lainnya. Adanya IHPS ini merupakan bentuk wujud dari *accountability for all* yang berguna untuk seluruh pihak berwenang dalam melakukan pengawasan dan pemberian masukan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara demi tercapainya tujuan negara.